

## STRATEGI EKONOMI BIRU (*BLUE ECONOMY*) INDONESIA DALAM MENANGANI *OVERFISHING* DI PERAIRAN INDONESIA

Muhammad Arsy Azzumar<sup>1)</sup>, Raisa Nur Annamira<sup>2)</sup>, Muhammad Farras Syafiq<sup>3)</sup>, Deasy Silvia Sari<sup>4)</sup>,  
Dina Yulianti Sulaeman<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

<sup>2)</sup>Mahasiswa, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

<sup>3)</sup>Mahasiswa, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

<sup>4)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

<sup>5)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

e-mail: [muhammad21081@mail.unpad.ac.id](mailto:muhammad21081@mail.unpad.ac.id)<sup>1)</sup>, [raisa21001@mail.unpad.ac.id](mailto:raisa21001@mail.unpad.ac.id)<sup>2)</sup>, [muhammad21061@mail.unpad.ac.id](mailto:muhammad21061@mail.unpad.ac.id)<sup>3)</sup>,  
[deasyilviasari@unpad.ac.id](mailto:deasyilviasari@unpad.ac.id)<sup>4)</sup>, [dina14@unpad.ac.id](mailto:dina14@unpad.ac.id)<sup>5)</sup>

### ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mengelilingi kepulauannya. Oleh karenanya, potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup besar. Namun, di balik besarnya potensi laut Indonesia terdapat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan yang berlebih (*overfishing*). Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonesia memperkenalkan strategi yang menggunakan konsep ekonomi biru (*blue economy*) untuk mengatasi masalah *overfishing* yang dinilai dapat meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keamanan ekologis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran daring. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah peta jalan (*road map*) ekonomi biru dengan target tahun 2045 untuk menghadapi masalah di kelautan terutama *overfishing*. Peta jalan tersebut untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Indonesia dan mengatasi berbagai masalah dan juga menjaga lingkungan hidup laut lewat pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Penggunaan ekonomi biru dalam peta jalan yang dibuat oleh Indonesia ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia yang didasari pada prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa mengorbankan keuntungan di masa depan.

Kata kunci: Ekonomi Biru, *Blue Economy*, *Overfishing*, Kawasan Konservasi Perairan (KKL), Indonesia

### ABSTRACT

*As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by water. Hence, Indonesia is blessed with abundant resources from the sea. However, this brings a series of threats to Indonesia. Amongst them is the issue of overfishing. The country then is committed to fighting the issue through the blue economy approach. The approach is believed to bring not only economic benefits, but also ecological sustainability and security. This research is trying to find how the approach is implemented. The research employs a qualitative approach and a descriptive method. Secondary data is gathered from literature studies and online research. The results show that Indonesia has created a blue economy road map that targets the year 2045 to tackle the overfishing problem. The road map is used to optimize the potential of the sea as well as to overcome environmental problems and this is done through the establishment of marine protected areas. The blue economy road map is concrete evidence of Indonesia's governments to preserving the sea and keeping the future generation intact.*

*Keywords: Blue Economy, Overfishing, Marine Protected Areas, Indonesia*

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki serangkaian bonus geografis yang menguntungkan. Tidak terkecuali luasnya wilayah perairan

di Indonesia. Hamparan luas zona maritim Indonesia dipenuhi dengan berbagai kesempatan. Di dalamnya terletak peluang

besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Namun, di balik sejuta peluang, turut terdapat ancaman dan kesulitan. Seperti contohnya, keharusan mendesak untuk menghadapi berbagai macam penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*). Sebagai negara yang diberkahi dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang luas, nasib Indonesia saling terkait dengan nasib lautan, di mana kemakmuran ekonomi bertemu bahaya degradasi lingkungan.

Ekonomi biru, sebuah konsep yang menggarisbawahi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, telah muncul sebagai prinsip panduan bagi negara-negara pesisir yang berusaha membuka potensi ekosistem laut mereka. Ekonomi biru mewakili perubahan paradigma dalam pendekatan kita terhadap tata kelola laut, menjelaskan nilai yang melekat dari sumber daya laut yang tidak terbatas pada eksploitasi, tetapi menaati prinsip-prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan ketahanan. Di Indonesia, di mana laut telah lama berfungsi sebagai garis hidup bagi jutaan orang, ekonomi biru beresonansi secara mendalam sebagai visi untuk masa depan yang lebih makmur, adil, dan berkelanjutan.

Strategi ekonomi biru Indonesia adalah bukti komitmen Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya sambil melindungi warisan alamnya untuk generasi mendatang. Berakar pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan inklusif, agenda ekonomi biru Indonesia berupaya menyeimbangkan kemakmuran ekonomi dengan integritas ekologis serta menumbuhkan hubungan simbiotik antara kesejahteraan manusia dan kesehatan laut. Dari pasar ikan Jakarta yang ramai hingga terumbu karang yang murni di Pulau Komodo, visi ekonomi biru Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk perikanan, akuakultur, pariwisata kelautan, energi terbarukan, dan bioteknologi.

Menurut Bank Dunia, sektor kelautan dan perikanan Indonesia berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan mempekerjakan lebih dari 12 juta orang dan menghasilkan sekitar 6% dari PDB negara (World Bank, 2022). Namun, keberlanjutan sektor vital ini berada di tengah ancaman penangkapan ikan berlebih, yang merusak kelayakan jangka panjang ekonomi biru Indonesia.

*Overfishing* telah muncul sebagai perhatian mendesak di perairan Indonesia, isu ini berkaitan erat dengan interaksi yang kompleks antara faktor sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan. Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Indonesia berada di antara lima produsen ikan penangkapan laut teratas secara global, dengan panen tahunan lebih dari enam juta ton (FAO, 2022). Namun, bonus geografis ini turut membuka lebar kerentanan mendasar dari ekosistem laut Indonesia, di mana praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan tata kelola yang lemah telah menuntut banyak korban ikan dan keanekaragaman hayati laut.

Terdapat berbagai penyebab *overfishing* di Indonesia yang saling berkaitan, mencakup berbagai faktor seperti ekspansi cepat armada penangkapan ikan industri hingga banyaknya kegiatan penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dengan akuntabel, dan tidak menaati peraturan yang berlaku, atau yang biasa disebut *Illegal, Unreported, and Unregulated fishing activities* (IUU).

Menurut sebuah laporan oleh Nature Conservancy, penangkapan ikan IUU terjadi hingga 40% dari total tangkapan di perairan Indonesia, membuktikan bahwa tindakan ini menjadi ancaman yang signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan (The Nature Conservancy, 2021). Selain itu, penegakan peraturan perikanan yang lemah dan kurangnya mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif telah memperburuk masalah

lebih lanjut, menyebabkan *overfishing* bertahan tanpa henti.

Dampak yang dihasilkan *overfishing* akan bertahan hingga jangka panjang, meliputi penipisan stok ikan untuk mencakup dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, *overfishing* telah menyebabkan penurunan stok ikan utama, termasuk tuna, kakap, dan makarel, serta turut mengancam mata pencaharian jutaan nelayan dan keluarga mereka (Kementerian Laut dan Perikanan, 2021). Selain itu, degradasi habitat laut dan hilangnya keanekaragaman hayati turut membahayakan ketahanan ekosistem laut Indonesia, menjadikannya semakin rentan terhadap gangguan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Di komunitas pesisir di seluruh Indonesia, konsekuensi dari *overfishing* dapat dirasakan dan dilihat dengan jelas, karena berdampak terhadap penangkapan nelayan umum semakin menipis dan pendapatan yang menurun, yang turut memperburuk kemiskinan dan kerawanan pangan.

Menurut sebuah penelitian oleh World Wide Fund for Nature (WWF), lebih dari 2,6 juta orang Indonesia secara langsung dipekerjakan di sektor perikanan, dengan jutaan lebih bergantung pada kegiatan terkait perikanan untuk mata pencaharian mereka (WWF, 2021). Angka tersebut tentunya besar; sayangnya keberlanjutan mata pencaharian ini terancam oleh eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab *overfishing* dan mempromosikan praktik manajemen perikanan yang berkelanjutan dibutuhkan secara mendesak.

Dalam menghadapi tantangan yang menakutkan ini, pemerintah Indonesia berada pada titik yang sangat penting, di mana dibutuhkan upaya untuk merekonsiliasi ekonomi dengan pengelolaan lingkungan. Ketika kita menggali lebih dalam kompleksitas

*overfishing* dan implikasinya terhadap strategi ekonomi biru Indonesia, menjadi semakin jelas bahwa langkah yang harus diambil membutuhkan pendekatan holistik, dipandu oleh inovasi, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk melestarikan laut untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian di atas, rumusan masalah yang timbul adalah menganalisis strategi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan *overfishing* di perairan Indonesia.

Ditinjau dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian ilmu sosial dan ilmu politik, yang dikhususkan pada Hubungan Internasional. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi spesifik pada sektor ekonomi, khususnya topik mengenai ekonomi biru. Tidak hanya itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan landasan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran pemahaman secara mendalam terkait strategi kebijakan ekonomi biru, terkhusus kepada isu penanganan *overfishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Selain itu, penelitian ini turut bermanfaat bagi penulis pribadi dalam menambah pengalaman melakukan penelitian dan juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

*Blue economy* atau ekonomi biru didefinisikan sebagai “pemanfaatan laut sebagai sumber daya dengan prinsip keberlanjutan yang dapat bermanfaat secara keseluruhan” (Smith-Godfrey, 2016). Konsep ekonomi biru secara garis besar mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang berasal dari aset kelautan dan pesisir, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan, serta menggabungkan beragam kegiatan

ekonomi yang terkait dengan samudra, lautan, dan pesisir pantai.

Konsep ekonomi biru sendiri telah berkembang seiring berjalannya waktu, yang berawal dari pengakuan akan pentingnya laut bagi peradaban manusia, tidak hanya sebagai sumber makanan dan transportasi, namun juga sebagai komponen penting dalam operasi ekonomi.

Istilah "*Blue Economy*" pertama kali muncul pada tahun 2009, dalam sidang Komite Perdagangan, Sains, dan Transportasi Senat Amerika Serikat. Diskusi tersebut menekankan pentingnya *Blue Economy* bagi perekonomian AS secara lebih luas, peluang ekonomi yang diberikannya, dan potensi menciptakan lapangan kerja baru di industri energi terbarukan sebagai respons terhadap permasalahan perubahan iklim. Pada 2012, Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Rio de Janeiro mengembangkan konsep ini di mana lautan dipilih sebagai kawasan prioritas. Target atau sasaran telah diusulkan, termasuk pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, keamanan pangan, energi berkelanjutan untuk semua, serta pengurangan risiko dan ketahanan bencana (Martínez-Vázquez et al, 2021).

Ekonomi biru kemudian berkembang menjadi bidang penelitian yang mencakup kegiatan ekonomi berbasis kelautan, yang sering kali digabungkan dengan sektor lain seperti pariwisata, transportasi laut, energi, dan perikanan. Pendekatan ini mendorong ekspansi jangka panjang industri maritim dan kelautan dengan mengakui samudra dan lautan sebagai mesin ekonomi global dengan potensi pertumbuhan dan inovasi yang sangat besar.

Selama beberapa tahun belakangan, tren penelitian mengenai ekonomi biru telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam makalah dan kutipan, dengan fokus pada relevansi berbagai sektor dan kepentingan pemerintah dalam mendorong sektor tersebut untuk pembangunan

ekonomi nasional. Dapat dikatakan bahwa pengembangan konsep ekonomi biru ini menggambarkan semakin meningkatnya pengakuan akan pentingnya menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ekonomi biru mencakup berbagai kegiatan dan sektor yang berkaitan dengan samudera, laut, dan pesisir. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan penghidupan, dan menciptakan lapangan kerja sekaligus melindungi kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru juga sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mencakup sektor-sektor yang sudah ada seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut, serta sektor-sektor yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, budidaya perikanan, dan bioteknologi. Pendekatan ini menyoroti keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi habitat maritim.

Kelestarian lingkungan merupakan komponen penting dari ekonomi biru, yang mencakup pengelolaan dan konservasi habitat laut dan pesisir. Hal ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon (karbon biru), dan pencegahan polusi laut. Ekonomi biru mendorong kegiatan yang mendukung kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dalam jangka panjang.

Keadilan sosial dalam ekonomi biru bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat sumber daya laut didistribusikan secara merata di antara berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat marginal dan pesisir. Hal ini mencakup penanganan permasalahan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi. Ekonomi biru bercita-cita untuk mendorong peluang inklusif bagi semua orang, terutama mereka yang bergantung pada air untuk mencari nafkah.

Keberhasilan penerapan ekonomi biru memerlukan tata kelola dan struktur kelembagaan yang efektif. Hal ini mencakup peraturan dan regulasi yang mendorong praktik berkelanjutan, mendorong investasi yang bertanggung jawab, dan memfasilitasi kerja sama internasional. Hal ini juga memerlukan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor komersial, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.

Penelitian interdisipliner dan transdisipliner yang mengintegrasikan informasi dari berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, ilmu sosial, dan teknologi sangat penting untuk memahami hubungan kompleks antara aktivitas manusia dan ekosistem laut, serta menghasilkan solusi baru terhadap kesulitan ekonomi biru.

Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam ekonomi biru karena memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Hal ini mencakup perbaikan dalam bioteknologi kelautan, teknologi energi terbarukan, dan praktik penangkapan ikan berkelanjutan.

Terakhir, ekonomi biru adalah gagasan global yang melibatkan kerja sama internasional untuk memecahkan masalah dan peluang bersama. Hal ini mencakup kolaborasi penelitian, berbagi praktik terbaik, dan kerja sama untuk melestarikan lingkungan maritim dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), metode penelitian kualitatif memberikan sarana untuk menggali dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan isu-isu sosial oleh individu atau kelompok. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan fokus pada interpretasi peneliti dengan menggunakan pendekatan Robert Stake

(2010). Metode deskriptif dikenal karena kemampuannya dalam memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena berdasarkan sudut pandang peneliti. Dengan demikian, menurut Stake (2010), penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian interpretatif, di mana peneliti memainkan peran penting dalam menafsirkan dan mendefinisikan kembali makna yang diamati.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk mengenai penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *data set* yang terlihat seperti tabel berikut:

N o .	Tem a Data	Identif ikasi	Sumb er Data	Teknik Pengump ulan Data
1	Peme rintah Indon esia	Upaya yang dilakuk an pemer intah Indone sia untuk menan gani <i>overfis hing</i>	Berita , Artike l, Jurnal , di media online	Studi pustaka dan menelaah upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menangani <i>overfishing</i> yang terjadi di Indonesia
2	Ekon omi biru	Penggu naan ekono mi biru dalam menan gani <i>overfis hing</i> di Indone sia	Berita , Artike l, Jurnal , di media online	Studi pustaka dan menelaah penggunaa n ekonomi biru untuk menangani masalah <i>overfishing</i> yang terjadi di Indonesia

3	<i>Overfishing</i> di Indonesia	Ancaman <i>overfishing</i> yang ada di Indonesia	Berita, Artikel, Jurnal, di media daring	Mendata dan menelaah masalah <i>overfishing</i> yang terjadi di Indonesia
---	---------------------------------	--	--	---

Tabel 3.1. Data Set Penelitian

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki pulau lebih dari 16.000 dan garis pantai sekitar 108.000 kilometer. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi biru yang dapat dikembangkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Tentu saja untuk mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan sebuah pedoman agar potensi yang ada tidak hanya menjadi keuntungan sesaat melainkan menjadi keuntungan yang berkelanjutan dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia menyusun sebuah pedoman untuk mengatur pengembangan potensi ekonomi biru di Indonesia.

Sejak 2021, Bappenas menyusun sebuah peta jalan untuk menjadi pedoman dalam mengembangkan perekonomian kelautan Indonesia agar lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan yang berbasiskan pada memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut serta mengamankan manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang (Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), 2023). Peta jalan tersebut telah diselesaikan oleh Bappenas pada 2023 dan akan berlaku sampai 2045.

Peta jalan ini dibuat untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia dengan mengedepankan keberlanjutan yang ramah lingkungan.

Pasalnya menurut Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, proyeksi nilai tambah ekonomi berbasis perairan akan mencapai 30 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada 2030, yang kemudian dapat menurunkan 20 persen gas rumah kaca, menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada 2030, dan keuntungan investasi laut berkelanjutan yang mencapai 15,5 triliun dolar AS (PPN/Bappenas, n.d.). Tentu saja sebagai negara kepulauan Indonesia melihat potensi ini sebagai keuntungan yang dapat dioptimalkan sehingga membawa keuntungan yang maksimal bagi Indonesia.

Dalam peta jalan yang dikeluarkan oleh Bappenas, terdapat tiga target utama yang menjadi garis besar peta jalan tersebut. Yang pertama adalah produk domestik bruto (PDB), yang kedua adalah jumlah tenaga kerja sektor maritim, dan yang ketiga adalah persentase lingkungan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), 2023). Tentu saja dengan dikeluarkannya peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman bagi berbagai pihak di Indonesia untuk mengelola ekonomi biru, baik pemerintah maupun swasta. Diharapkan berbagai pihak ikut membantu dalam menjalankan pedoman yang telah dibuat oleh Bappenas ini dari tingkat pemerintah pusat hingga ke nelayan yang langsung terjun di lapangan.

Tentu saja Bappenas juga telah mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan peta jalan ekonomi biru yang telah dibuat. Beberapa tantangan tersebut seperti, kurangnya koherensi, sinergi, dan kapasitas dalam kebijakan dan implementasi, kurangnya investasi di bidang infrastruktur, termasuk di bidang transportasi, ketimpangan yang tinggi di seluruh kelompok pendapatan dan wilayah, ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil, rendahnya tingkat dan buruknya akses terhadap literasi kelautan, degradasi lingkungan, termasuk ekosistem

laut dan pesisir dan kurangnya data sumber daya kelautan dan pesisir serta dampak sosio-ekonomi (Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency, 2023).

Salah satu sektor dari ekonomi biru yang dibahas di peta jalan buatan Bappenas adalah sektor penangkapan ikan karena Indonesia merupakan negara kedua terbesar dalam hal produksi perikanan di dunia. Dalam sektor perikanan ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang terkait serta berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi ekosistem laut dan pesisir, meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan terhadap PDB, dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Sementara pemerintah Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan seperti memperkuat penegakan hukum, memperbaiki kondisi pekerja perikanan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, dan meminimalkan degradasi ekologi akibat perubahan iklim, limbah, dan polusi. Selain yang sudah disebutkan, salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah *overfishing*.

#### 4.2. Masalah *Overfishing*

Sebagai sebuah negara kepulauan, sumber daya alam Indonesia di laut sangatlah melimpah. Selain itu, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mencakup 6,1 juta kilometer persegi. Walaupun seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Indonesia merupakan produsen perikanan kedua terbesar di dunia, tapi sektor perikanan ini hanya menyumbang sekitar 2.8 persen PDB Indonesia pada 2020. Hal tersebut terjadi karena sebuah fenomena yang mengancam yaitu *overfishing*. *Overfishing* merupakan fenomena di mana terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan di suatu tempat yang mengakibatkan populasi ikan semakin sedikit hingga habis tak bersisa ataupun tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi. Salah satu tandanya terjadinya *overfishing* adalah turunnya hasil tangkapan ikan per-

perjalanan. Salah satu wilayah yang mengalami *overfishing* adalah Laut Jawa.

Menurut Dahuri (2012), indikator kondisi *overfishing* suatu stok sumber daya ikan adalah sebagai berikut. Pertama, total volume hasil tangkapan (produksi) lebih besar dari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sumber daya ikan tersebut. Kedua, adalah hasil tangkapan ikan cenderung menurun. Ketiga, adalah rata-rata ukuran ikan yang tertangkap semakin mengecil. Terakhir, daerah penangkapan ikan semakin menjauh dari daratan atau semakin dalam ke dasar laut (Dao, 2023).

Menurut Liandi (2023), mengutip dari *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia* pada tahun 2022 oleh *World Research Institute* menemukan bahwa lebih dari setengah stok ikan liar di Indonesia mengalami *overfishing*. Menurut Bappenas sendiri di dalam pedomannya pada 2017 sendiri terjadi penangkapan ikan yang berlebih sekitar 38 persen dengan 600 ribu kapal yang tidak diawasi dan tidak diatur. Terjadinya *overfishing* tersebut memiliki banyak penyebab, di antaranya adalah, kenaikan permintaan produk perikanan yang sangat cepat; pelaku ekonomi biru yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan; penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang; subsidi BBM dari pemerintah untuk nelayan; masih adanya penangkapan ikan secara ilegal, tidak terawasi, dan tidak diatur; nelayan ilegal dari negara lain yang datang untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia; terlalu banyak armada penangkap ikan yang beroperasi; dan kurangnya penegakan hukum di laut terkait penangkapan ikan.

Fenomena *overfishing* ini pun memiliki dampak buruk bagi Indonesia. Dampak tersebut di antaranya sebagai berikut. Penurunan stok ikan akibat praktik ini mengancam ekosistem laut yang penting bagi keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. Selain itu, nelayan lokal yang bergantung pada

perikanan tradisional menjadi korban utama, karena penurunan hasil tangkapan mengancam mata pencaharian mereka. Kerugian ekonomi yang signifikan juga terjadi, karena perikanan adalah sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia. Konflik sosial antara nelayan lokal, industri perikanan besar, dan negara-negara lain yang juga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dapat meningkat akibat persaingan untuk sumber daya perikanan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tindakan komprehensif seperti pengaturan ketat terhadap penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan laut.

Untuk mengatasi masalah *overfishing* ini diperlukan kerja sama dan komitmen dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan baik pemerintah maupun swasta. Karena masalah *overfishing* terjadi akibat berbagai hal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri maka penyelesaiannya juga membutuhkan partisipasi berbagai negara terutama yang berdekatan, khusus untuk Indonesia dengan negara di ASEAN. Masalah *overfishing* ini sangat penting untuk dibenahi oleh pemerintah Indonesia karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan serta banyak warganya yang bergantung di sektor perikanan.

#### **4.3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi *Overfishing***

Pemerintah Indonesia sangat proaktif dalam inisiatif internasional untuk memerangi *overfishing* yang sedang terjadi. Sebagai dasar adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang menggarisbawahi pentingnya upaya konservasi, khususnya yang berkaitan dengan stok ikan yang bermigrasi dan bermigrasi jauh. Selain itu, Indonesia telah menandatangani

Compliance Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas pada tahun 1993. Perjanjian ini berupaya untuk mendorong praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan mencegah eksploitasi.

Di tingkat domestik, pemerintah mengambil berbagai kebijakan dan inisiatif, salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas 115 yang bertugas memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*). Sesuai Peraturan Presiden 115/2015, Satgas dibentuk dan berperan penting dalam pemberantasan IUU perikanan di perairan Indonesia. Kebijakan penting yang diterapkan adalah kebijakan penenggelaman kapal, yang mengakibatkan 556 kapal dilarang terbang karena dianggap terlibat dalam operasi penangkapan ikan ilegal. Untuk menghentikan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut dan mencegah eksploitasi sumber daya ikan oleh kapal asing, pemerintah juga memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan. Rencana Aksi Internasional untuk Mencegah, Mencegah, dan Menghapuskan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur telah diadopsi oleh negara. Strategi yang diusulkan menggambarkan tindakan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan operasi penangkapan ikan dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan dan melawan metode penangkapan ikan ilegal.

Selain itu, untuk menghilangkan aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh kapal asing, pemerintah Indonesia melarang *transshipment* di laut. Strategi komprehensif untuk memerangi eksploitasi dan mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia mencakup tindakan-tindakan ini. Peningkatan operasi patroli dan pengawasan juga merupakan komponen

strategi pemerintah untuk memantau dan mengatur perikanan di perairan Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan penekanan besar pada peningkatan hasil perikanan minimum berkelanjutan / *minimum sustainable yield* (MSY), sebagai sebuah tujuan yang secara substansial tercapai setelah penerapan strategi yang bertujuan untuk menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak diatur (IUU). Data kemajuan MSY menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perikanan, sebagaimana dibuktikan hasil dari upaya ini, produktivitas dan stok ikan meningkat, sehingga membantu perluasan sektor perikanan dan meningkatkan aksesibilitas makanan untuk masyarakat sekitar.

Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL) sebagai sarana untuk menjaga stok ikan dan melestarikan keanekaragaman hayati laut merupakan pendekatan penting lainnya. Selain itu, batas tangkapan telah ditetapkan untuk mencegah eksploitasi populasi ikan secara berlebihan dan pembatasan jenis dan ukuran alat penangkapan ikan, penutupan musiman, dan peraturan batas tangkapan juga diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan.

Pemerintah Indonesia juga mulai memprioritaskan pendidikan masyarakat lokal tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Sistem pengelolaan sumber daya laut tradisional, seperti Sasi laut, mulai diaplikasikan untuk mengawasi operasi penangkapan ikan dan mendorong pemanfaatan sumber daya berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan

Ekonomi biru adalah konsep ekonomi yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi, kemakmuran, dan lapangan kerja. Ini mencakup sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, transportasi, energi terbarukan, industri kelautan, dan teknologi. Konsep tersebut mempertimbangkan saling ketergantungan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini mendorong penggunaan bioteknologi kelautan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Konsep ekonomi biru ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim untuk mengoptimalkan sumber daya lautnya di berbagai sektor termasuk menanggulangi permasalahan yang ada, salah satunya adalah *overfishing*.

*Overfishing* di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang kompleks karena mengganggu ekosistem laut yang berdampak tidak hanya kepada keragaman hayati yang tinggal di ekosistem laut namun juga nelayan lokal yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut itu sendiri. Adapun upaya yang telah ditempuh pemerintah saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait penangkapan ikan serta pembentukan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan berpartisipasi di forum internasional untuk menyuarakan pencegahan eksploitasi laut. Dari upaya-upaya tersebut, perlu ditekankan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan menerapkan kearifan lokal di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, M. K. (2021). Praktik Pembederaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan. *Indonesian Journal of International Law*, 1(3), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.402>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dao, Y. (2023, July 3). *Overfishing dan Ancaman Penurunan Populasi Ikan*. LautSehat.ID. <https://lautsehat.id/flora-fauna/yuniasdao/overfishing-dan-ancaman-penurunan-populasi-ikan/>
- Djunarsjah, E., Kusumadewi, D., & Chairuniza, G. (2021). The effectiveness of Indonesia's fisheries policy to reduce illegal fishing. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805(1), 012018.
- Gischa, S. (2023, November 9). Overfishing: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/10/033000269/overfishing--pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all>
- Lewerissa, Y. A., Ashri, M., Muhadar, et al. (2021). Sasi laut as a non-penal effort treatment of illegal fishing for sustainable utilization of fishery resources. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805(1), 012018.
- Liandi, A. (2023, June 16). *Overfishing sebagai Isu Kontroversial dalam Industri Perikanan Indonesia: Fakta dan Dampaknya*. LautSehat.ID. <https://lautsehat.id/flora-fauna/andryan/overfishing-sebagai-isu-kontroversial-dalam-industri-perikanan-indonesia-fakta-dan-dampaknya/>
- Longépé, N., Hajduch, G., Ardianto, R., et al. (2018). Completing fishing monitoring with spaceborne vessel detection system (VDS) and automatic identification system (AIS) to assess illegal fishing in Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 131, 33-39.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMFA). (2018). Fisheries productivity of Indonesia.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). (2020). Annual Report.
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas). (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2022). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Petrossian, G. (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: a situational approach. *Biological Conservation*, 189, 39-48.

PPN/Bappenas, K. (n.d.). *Bappenas Paparkan Proyeksi Ekonomi Biru di Indonesia Development Forum 2023 | Kementerian PPN/Bappenas*.  
<https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-paparkan-proyeksi-ekonomi-biru-di-indonesia-development-forum-2023-EI9R1>

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Stake, R. E. (2010). *Qualitative research: studying how things work*.  
<https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB01625242>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*.

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., & Steenbergen, D. J. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.